



PIDATO
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TANGGAPAN PEMERINTAH
ATAS
PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI DPR RI
TERHADAP
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN
POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL
TAHUN ANGGARAN 2022

RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 31 Mei 2021

Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,

Yang Saya hormati, Ibu Ketua, Para Wakil Ketua, dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pagi ini kita bisa menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk melanjutkan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). Pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua Fraksi DPR-RI atas berbagai masukan, pandangan, saran, serta dukungannya terhadap KEM PPKF Tahun Anggaran 2022. Pandangan tersebut akan menjadi masukan yang sangat berharga dalam pembahasan dan penyusunan Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2022.

Ibu Ketua, Para Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,

Perkenankan kami memberikan tanggapan dan jawaban terhadap berbagai pertanyaan dan pandangan yang telah disampaikan oleh **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; Fraksi Partai Golongan Karya; Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya; Fraksi Partai Nasional Demokrat; Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa; Fraksi Partai Demokrat; Fraksi Partai Keadilan Sejahtera; Fraksi Partai Amanat Nasional;** serta **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.**

Pemerintah sangat menghargai dukungan dan kerjasama terus-menerus dari seluruh fraksi dalam penanganan pandemi Covid-19. Kita berharap pandemi di dalam negeri dapat terus dikendalikan melalui berbagai upaya bersama, baik itu penegakan protokol kesehatan, peningkatan *testing, tracing and treatment*, maupun vaksinasi. Kerja sama seluruh komponen bangsa dan semangat gotong-royong untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi sangat penting untuk terus diperkuat.

Sekali lagi pemerintah menyampaikan bahwa tanpa adanya pemulihan kesehatan, sulit mengharapkan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Saat ini, pandemi Covid-19 masih sangat mengancam dan memberi ketidakpastian bagi negara mana pun di dunia. Walaupun sudah mulai turun, kasus harian di India masih sangat tinggi. Gelombang baru pun masih terus terjadi, termasuk di beberapa negara tetangga kita seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand. Berbagai varian virus masih terus bermunculan. Kemampuan dan intensitas penegakan disiplin protokol kesehatan di setiap negara berbeda-beda. Kapasitas sistem kesehatan dan akses terhadap *supply* vaksin secara global masih timpang. Untuk mengakhiri pandemi dibutuhkan kekuatan kolektif semua negara, tidak boleh ada satu pun yang tertinggal.

Di tengah situasi yang masih menantang itu, Indonesia harus terus menjaga sikap antisipatif sambil terus memberi respon yang tepat terhadap segala dinamika yang terjadi. APBN sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang vital, akan terus digunakan untuk upaya-upaya intervensi penanganan kesehatan, perlindungan sosial, serta dukungan pada dunia usaha terutama UMKM. Tahun 2020 dan 2021 telah mengajarkan kepada kita bahwa di tengah ketidakpastian yang tinggi akibat pandemi, peranan APBN yang adaptif, responsif, dan fleksibel menjadi faktor yang sangat penting untuk memastikan langkah-langkah penanganan Covid-19 dapat dilakukan. APBN harus tetap bekerja keras dan bekerja cepat dalam melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman terhadap kesehatan dan jiwa, menjaga kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan, serta mendukung daya tahan dunia usaha, baik UMKM maupun korporasi.

Kita tentu terus berikhtiar dan melakukan segala daya upaya agar pandemi dapat segera usai. Meski demikian, sikap waspada harus tetap tinggi. Untuk itu, selain harus tetap kredibel, *sustainable*, dan akuntabel, APBN 2022 juga harus tetap mampu untuk merespon dinamika yang dapat berubah secara cepat; tetap antisipatif terhadap risiko yang mungkin terjadi. Pada saat yang sama, APBN 2022 harus tetap mendukung kebijakan-kebijakan reformasi struktural yang sangat penting untuk membangun fondasi baru pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat,

Menanggapi pandangan dari **Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat,**

Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP mengenai asumsi pertumbuhan ekonomi, dapat kami sampaikan bahwa dalam menyusun *outlook* pertumbuhan ekonomi 2021 dan proyeksi di tahun 2022, pemerintah selalu mempertimbangkan berbagai faktor secara komprehensif, termasuk dinamika aktivitas ekonomi yang terus berkembang baik domestik maupun global. Pemerintah memandang bahwa rentang angka *outlook* pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 – 5,3 persen di tahun 2021, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,2 - 5,8 di tahun 2022, telah mencerminkan optimisme arah pemulihan ekonomi dan juga potensi akselerasi pertumbuhan ekonomi dari reformasi struktural. Rentang angka proyeksi tersebut, juga secara realistis mencerminkan risiko ketidakpastian yang masih tinggi.

Di satu sisi, optimisme pemerintah didasarkan pada tren pemulihan ekonomi yang semakin kuat. Berbagai *leading indicator* terus mengalami peningkatan. Indeks keyakinan konsumen sudah pada level optimis (di atas 100). Indeks penjualan ritel terus meningkat. PMI manufaktur terus mencatat ekspansi dalam enam bulan berturut-turut. Konsumsi listrik industri dan bisnis terus membaik dan telah tumbuh positif. Kita bersyukur bahwa pantauan perkembangan kasus Covid-19 pasca Idulfitri menunjukkan angka kasus harian yang cukup terkendali. Kita berharap langkah antisipasi dan kesadaran masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan mampu meredam potensi peningkatan kasus harian Covid-19 yang biasanya terjadi pasca libur panjang.

Momentum pemulihan ekonomi tersebut diharapkan akan terus berlanjut di tahun 2022. Upaya penanganan pandemi dan vaksinasi massal diharapkan dapat mengendalikan laju penambahan kasus positif Covid-19 dan mempercepat terwujudnya *herd immunity* di Triwulan I 2022. Dengan demikian, aktivitas sosial ekonomi diharapkan akan terus mengalami normalisasi ke level sebelum pandemi.

Selaras dengan pemulihan aktivitas sosial ekonomi, berbagai langkah reformasi struktural tetap dilanjutkan. Reformasi struktural menjadi syarat perlu agar potensi perekonomian nasional dapat dioptimalkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi. Implementasi UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya, pembangunan infrastruktur dasar dan digital, peningkatan penguasaan teknologi, peningkatan efisiensi produksi, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, akan meningkatkan kapasitas produksi dan kinerja perekonomian ke depan. Kebijakan reformasi akan meningkatkan investasi, memperbaiki iklim usaha, dan menciptakan

lapangan kerja berkualitas (*decent jobs*). Peran tenaga kerja, yang terus tumbuh dalam periode *window* bonus demografi, akan semakin kuat dan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi.

Proyeksi pemerintah tentang pertumbuhan ekonomi, cukup sejalan dengan asesmen yang dilakukan oleh berbagai lembaga internasional, seperti Bank Dunia, OECD, ADB, IMF dan *Consensus Forecasts*. Asesmen dari berbagai Lembaga tersebut terhadap perekonomian Indonesia masih bervariasi dalam rentang 4,3 - 4,9 persen untuk outlook pertumbuhan ekonomi 2021 dan 5,0 – 5,8 persen untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi 2022. Variasi asesmen, dalam rentang yang masih tinggi, menunjukkan masih tingginya risiko ketidakpastian.

Meskipun momentum pemulihan yang sedang terjadi memberikan dasar untuk optimis, pemerintah juga sepakat dengan pandangan anggota dewan, terkait perlunya mengantisipasi potensi risiko yang mungkin terjadi seiring pemulihan ekonomi domestik dan global. Berbagai risiko termasuk yang bersumber dari lingkungan eksternal masih akan sangat tinggi. Selain dari perkembangan Covid-19, pemulihan ekonomi global diperkirakan tidak akan seragam (*uneven recovery*). Akses masing-masing negara terhadap *supply* vaksin masih cenderung sangat timpang. Kemampuan negara-negara untuk belanja stimulus juga sangat berbeda-beda.

Indonesia juga perlu mengantisipasi keberlanjutan *rebalancing economy* Tiongkok yang akan dapat mempengaruhi fluktuasi harga komoditas dan memberi dampak negatif pada Indonesia. Selain itu, berbagai permasalahan global seperti proteksionisme, tensi geopolitik dan perubahan iklim juga harus terus diwaspadai. Pemerintah sependapat bahwa risiko-risiko ini harus dimitigasi dengan berbagai langkah kebijakan yang antisipatif. Dalam jangka pendek, langkah utama mengantisipasi risiko global tentunya adalah memastikan penanganan pandemi dan pelaksanaan vaksinasi berjalan efektif, serta pemulihan ekonomi dapat berlangsung cepat. Selain itu, reformasi struktural juga harus berhasil agar kepercayaan investor terhadap Indonesia dapat dijaga. Salah satu langkah reformasi struktural yang krusial untuk mengantisipasi gejolak eksternal di masa mendatang adalah dengan terus membangun perekonomian yang lebih bernilai tambah serta mendorong diversifikasi ekspor baik dari komoditas maupun mitra dagang.

Hadirin yang saya muliakan,

Menanggapi pandangan dari **Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi PAN** terkait asumsi laju inflasi dalam KEM PPKF tahun anggaran 2022 pada kisaran 2,0 – 4,0 persen dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut.

Pemerintah terus berkoordinasi dengan otoritas moneter, Bank Indonesia, untuk merumuskan bauran kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil yang tepat dalam menjaga laju inflasi nasional pada level yang rendah dan stabil. Strategi 4K dalam pengendalian laju inflasi nasional terus dilakukan. Ini mencakup Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi masyarakat. Keseluruhan strategi ini tetap diletakkan dalam konteks percepatan pemulihan aktivitas ekonomi yang sedang berlangsung.

Pemerintah terus berupaya melaksanakan serangkaian kebijakan sisi penawaran dan permintaan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk menjaga kestabilan inflasi sesuai dengan rentang sasaran inflasi yang ditetapkan. Berbagai program untuk menjaga daya beli masyarakat juga tetap dilakukan untuk menjaga arah pemulihan konsumsi domestik sehingga tetap dapat menjadi penopang percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Sasaran inflasi dalam jangka menengah dan panjang akan dicapai melalui pengendalian laju inflasi inti, yang erat kaitannya dengan ekspektasi inflasi masyarakat. Di sisi lain, stabilitas nilai tukar Rupiah diharapkan dapat terus dijaga agar bergerak sesuai dengan fundamentalnya. Nilai tukar yang stabil akan meminimalkan risiko transmisi *imported inflation* terutama dari gejolak harga komoditas di tingkat global. Fluktuasi inflasi *volatile food* juga harus terus dikendalikan agar masyarakat tetap mendapatkan kepastian akses terhadap bahan pangan. Pemerintah akan terus mengelola risiko *administered price* dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang terukur guna menjaga arah pemulihan aktivitas ekonomi, khususnya konsumsi rumah tangga dan aktivitas industri.

Pemerintah sangat sependapat dengan pandangan bahwa kewaspadaan harus tinggi. Pemerintah akan terus memantau pengaruh fluktuasi harga minyak mentah dunia terhadap inflasi. Arah pergerakan harga minyak mentah dunia saat ini, masih

cenderung meningkat. Ini akan memberikan dampak yang positif pada penerimaan minyak dan gas. Di sisi lain, harga yang meningkat juga dapat menjadi risiko bagi besaran subsidi energi yang akan memengaruhi postur APBN. Dinamika pandemi Covid-19 tentu saja akan tetap menjadi faktor utama yang memengaruhi kondisi ekonomi global dan dinamika harga minyak dunia.

Pesatnya pengembangan dan penggunaan energi alternatif akan sangat positif untuk mendukung green recovery. Namun juga perlu diwaspadai dan diantisipasi bahwa penggunaan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan akan mempengaruhi harga minyak dalam jangka menengah. Perubahan tensi geopolitik dunia juga harus terus diwaspadai ke depan. Pemerintah memandang asumsi harga minyak di tahun 2022 dalam kisaran US\$55 – US\$65 per barel mencerminkan dinamika dan ketidakpastian di atas.

Hadirin yang saya muliakan,

Menanggapi pandangan dari **Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi PAN** terkait asumsi suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Tingkat suku bunga atau *yield* ditentukan oleh mekanisme pasar. Asumsi tingkat suku bunga SUN 10 tahun pada tahun 2022 mencerminkan kebutuhan pembiayaan APBN serta risiko ketidakpastian pasar keuangan global yang diperkirakan masih akan berlangsung. Salah satu risiko yang harus diwaspadai terhadap tingkat imbal hasil SUN adalah perubahan kebijakan moneter negara maju, khususnya Amerika Serikat, yang didorong oleh pemulihan ekonomi yang cepat serta stimulus fiskal yang besar. Kita pernah belajar dari fenomena terdahulu seperti *taper tantrum* di tahun 2013, dimana ekspektasi normalisasi kebijakan moneter AS dapat mendorong pembalikan arus modal dari negara berkembang. Pemerintah akan terus bersinergi dengan otoritas moneter dan jasa keuangan dalam melakukan pemantauan dan mengambil langkah-langkah kebijakan secara antisipatif dan terkoordinasi.

Salah satu langkah sinergi dengan otoritas lain seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan adalah terkait dengan pendalaman dan pengembangan pasar keuangan. Pemerintah sepakat bahwa pasar keuangan domestik yang dalam, aktif, dan likuid sangat diperlukan dalam meningkatkan stabilitas pasar yang pada

gilirannya akan menurunkan *yield* SUN. Pasar keuangan yang dalam, aktif, dan likuid, akan menjadi sumber pembiayaan yang stabil, efisien, dan berkesinambungan. Hal ini akan meminimalkan dampak risiko volatilitas aliran modal investor asing terhadap *yield* SUN.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Menanggapi pandangan mengenai isu kesejahteraan yang disampaikan oleh **Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PKB, dan Fraksi PPP**, dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut.

Akibat pandemi Covid-19, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia terhambat, khususnya di tahun 2020. Capaian indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2020 naik sebesar 0,02 poin menjadi 71,94 dari 71,92 pada tahun 2019. Angka Rasio Gini kembali mengalami kenaikan pada 2020 menjadi 0,385. Memasuki 2021, seiring dengan tren pemulihan pertumbuhan ekonomi, indikator-indikator kesejahteraan masyarakat mulai menunjukkan perbaikan.

Tingkat pengangguran sempat naik di Agustus 2020 ke 7,07%. Pada bulan Februari 2021, tingkat pengangguran telah turun ke 6,26%. Selama periode tersebut, perekonomian menciptakan 2,61 juta lapangan kerja baru. Penyerapan ini lebih cepat daripada penambahan jumlah pencari kerja baru yang meningkat 1,59 juta orang dalam periode yang sama.

Kesejahteraan petani dan nelayan bergerak dengan pola yang sama. Nilai Tukar Petani (NTP), yang sempat turun di bawah 100 pada periode Mei-Juni 2020, telah kembali menguat di atas 103 hingga April 2021. Selaras dengan NTP, indikator kesejahteraan nelayan (Nilai Tukar Nelayan/NTN) juga mengalami perbaikan yang mencapai 103,70 pada April 2021.

Kesejahteraan masyarakat diharapkan akan dapat ditingkatkan lagi di tahun 2021 dan 2022. Berbagai langkah kebijakan dalam program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) telah berhasil menahan dampak negatif pandemi di tahun 2020 dan 2021. Momentum ini perlu terus kita dorong agar penghasilan rumah tangga, khususnya yang miskin dan rentan, kembali meningkat. Tingkat kemiskinan diharapkan akan kembali menjadi *single digit*.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Dengan memperhatikan pelaksanaan APBN 2020 dan APBN 2021, dengan mempertimbangkan seluruh tantangan dan dinamika perekonomian global dan domestik di atas, pemerintah menyusun Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2022. APBN akan tetap efektif sebagai instrumen kebijakan, berdaya tahan, mampu menavigasi risiko, dan *sustainable* untuk mendukung akselerasi pemulihan ekonomi dan pelaksanaan reformasi struktural.

Pemantapan pemulihan ekonomi ditempuh dengan 2 (dua) pendekatan utama, yaitu: (i) mendorong efektivitas penanganan COVID-19 sebagai kunci pemulihan ekonomi; dan (ii) menjaga tren pemulihan berlanjut melalui berbagai program yang difokuskan untuk mendorong sektor-sektor strategis yang mempunyai daya ungkit untuk akselerasi pemulihan sosial-ekonomi.

Reformasi struktural akan meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi. Reformasi ini antara lain ditempuh dengan: (i) memperkuat SDM melalui peningkatan kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan sosial; (ii) mendukung pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi (al. ICT, infrastruktur konektivitas, energi, dan pangan); dan (iii) penguatan institusional melalui reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi.

Untuk akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural di atas, kebijakan fiskal harus terus diperkuat dengan optimalisasi pendapatan negara, penguatan kualitas belanja negara, dan pembiayaan anggaran yang inovatif, *prudent* dan *sustainable*.

Pemerintah menyadari bahwa penerimaan perpajakan berkontribusi sangat signifikan dalam pendapatan negara. Di tengah proses pemulihan ekonomi, upaya pencapaiannya masih akan menghadapi tantangan. Oleh karena itu, kami mengapresiasi pandangan dari **Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS dan Fraksi PAN** terkait pentingnya mendorong optimalisasi pendapatan negara. Target perpajakan harus dapat dicapai dan rasio perpajakan harus ditingkatkan.

Optimalisasi penerimaan perpajakan dilakukan untuk menciptakan perpajakan yang lebih sehat dan adil. Hal ini dilakukan melalui reformasi administrasi dan reformasi kebijakan. Secara umum, optimalisasi penerimaan perpajakan 2022 akan ditempuh

dengan: (i) menggali potensi perpajakan melalui kegiatan pengawasan dan pemetaan kepatuhan yang berbasis risiko; (ii) memperluas basis perpajakan melalui perluasan objek dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan; dan (iii) menyesuaikan regulasi perpajakan yang sejalan dengan struktur ekonomi dan karakteristik sektor perekonomian.

Penguatan administrasi perpajakan dalam jangka menengah dilakukan melalui 5 (lima) pilar, yang mencakup sisi organisasi, proses bisnis, regulasi, sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi.

Konsistensi dalam melakukan reformasi perpajakan dan pemulihan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan rasio perpajakan secara bertahap. Pemerintah optimis bahwa penerimaan perpajakan tahun 2022 akan lebih baik dibandingkan tahun 2021. Rasio perpajakan tahun 2022 diperkirakan pada kisaran 8,37% sampai dengan 8,42% terhadap PDB, atau lebih tinggi dibandingkan dengan target di APBN 2021 sebesar 8,18% PDB.

Peningkatan PNBPN ditempuh melalui optimalisasi pengelolaan aset negara agar dan penyempurnaan tata kelola PNBPN. Di sisi lain, pemerintah juga tetap akan menjaga agar layanan publik tetap berkualitas, dan memperhatikan konservasi lingkungan hidup.

Ibu Ketua, Para Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,

Secara umum, pemerintah mengapresiasi pandangan **Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP** terkait pentingnya penguatan belanja untuk mendukung efektivitas penanganan Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi, mendukung reformasi struktural, mendorong subsidi dan bansos agar lebih tepat sasaran dan efektif, serta terus mendorong penguatan desentralisasi fiskal dan penguatan sinergi antara pusat dan daerah.

Penguatan kualitas belanja ini akan terus dilakukan. **Pertama**, belanja akan diprioritaskan pada penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal, penguatan program perlindungan sosial sepanjang hayat yang adaptif, penguatan kualitas pendidikan yang menciptakan SDM unggul dan berdaya saing, pembangunan infrastruktur yang mempercepat transformasi ekonomi, serta perbaikan birokrasi yang lebih efektif dan efisien.

Kedua, reformasi penganggaran terus dilanjutkan. Belanja kebutuhan dasar harus semakin efisien. Program prioritas tetap menjadi fokus. Pelaksanaan anggaran harus semakin berbasis hasil. Mitigasi risiko anggaran tetap didesain dengan baik.

Ketiga, transformasi subsidi dan bansos dilanjutkan agar lebih tepat sasaran dan efektif. Akurasi data penerima (DTKS) harus ditingkatkan. Mekanisme penyaluran, sinergi dan integrasi antara program yang relevan, harus terus diperbaiki.

Keempat, penguatan kualitas desentralisasi fiskal akan terus dilakukan. Sistem pajak daerah dikembangkan untuk mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien. Kualitas belanja di daerah terus diperbaiki agar layanan publik lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pemerintah sependapat bahwa alokasi TKDD harus digunakan secara optimal, transparan dan akuntabel oleh pemerintah Daerah untuk mendukung pembangunan manusia melalui kesehatan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Belanja daerah juga harus berperan kuat dalam pemberdayaan ekonomi daerah khususnya dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Sinergi dan harmoni hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan agar *output* dan *outcome* dari belanja negara semakin dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat di setiap sudut NKRI.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Menanggapi pandangan **Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PD, Fraksi PKS, Fraksi PAN** dan **Fraksi PPP**, terkait defisit dan pembiayaan anggaran, kami dapat sampaikan bahwa pemerintah sangat mengapresiasi pandangan anggota Dewan yang terhormat mengenai pentingnya menjaga pengelolaan fiskal yang sehat, berdaya tahan terhadap risiko, dan berkelanjutan.

Kebijakan fiskal 2022 masih tetap ekspansif namun terarah dan terukur. Pemerintah akan tetap konsisten menjaga keseimbangan antara kemampuan belanja yang *countercyclical* dengan risiko fiskal yang harus tetap dijaga. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah akan melakukan konsolidasi fiskal secara bertahap, di mana defisit akan kembali ke maksimal 3 persen PDB di tahun 2023.

Utang tetap dikelola secara *prudent* dan *sustainable*. Utang digunakan sebagai salah satu instrumen penting dalam kebijakan fiskal yang *countercyclical*. Mitigasi risiko utang dilakukan dengan menjaga rasio utang dalam batas terkendali, serta melakukan

pendalaman pasar agar *cost of fund* lebih efisien dan kompetitif. Pemerintah terus mendorong pembiayaan inovatif dengan pengembangan skema KPBU yang lebih masif, penguatan peran SWF dan SMV, serta mendorong efektivitas peran BUMN sebagai agen pembangunan untuk ikut berperan aktif dalam mengakselerasi pencapaian target pembangunan.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Demikianlah jawaban dan tanggapan pemerintah atas Pandangan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022. Tanggapan yang lebih lengkap terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi DPR kami sampaikan secara tertulis, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban yang kami sampaikan ini.

Sebagai penutup, sekali lagi, atas nama pemerintah, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dan kerja sama segenap anggota Dewan dalam menyelesaikan agenda konstitusional yang merupakan amanat mulia dari seluruh rakyat Indonesia. Semoga pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022 dapat berjalan lancar dan dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Akhir kata, kami mengajak Ibu/Bapak para anggota dewan yang mulia untuk menghiasi ikhtiar dan kerja keras kita bersama dengan doa dan tawakal agar kita semakin yakin bahwa yang terbaik yang menjadi ketetapan-Nya. Karena sesungguhnya apabila Tuhan menghendaki sesuatu untuk terjadi, Dia hanyalah berkata: "Jadilah, maka terjadilah ia".

Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq

Wassalammu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh.

Jakarta, 31 Mei 2021

a.n. Pemerintah Republik Indonesia

Menteri Keuangan

ttd

Sri Mulyani Indrawati